

# Masyarakat Aceh Peringati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, 2019

\*Pertama kalinya 7 Puskesmas dari 4Kabupaten di Provinsi Aceh merayakan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS)



Secara global, masyarakat diseluruh dunia tahun ini memperingati HKJS dengan tema *Mental Health Promotion and Suicide Prevention* atau Promosi Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Bunuh Diri. Di Indonesia, tema ini digabungkan dengan tema Nasional yakni 'Sehat Jiwa Dimulai Dari Diri, Keluarga, dan Masyarakat'. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia atau WHO, setiap 40 detik ada 1 orang yang kehilangan nyawa karena

bunuh diri atau setiap tahunnya ada lebih dari 800,000 orang meninggal dunia karena bunuh diri. Sementara itu, prevalensi kasus depresi di Indonesia pada usia >15 tahun adalah 6.1% dengan cakupan pengobatannya hanya 9%, merujuk pada Data Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2018. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh sendiri per tahun 2017 melaporkan terdapat sekitar 21,349 jiwa masyarakat Aceh mengalami kondisi gangguan jiwa.

Namun jumlah ini belum mencakup data mereka yang beresiko serta beberapa kondisi lainnya. Dengan jumlah kasus yang terus bertambah dan jika tidak ditangani dengan baik, maka sangat dikhawatirkan akan meningkatnya kasus gangguan kejiwaan berujung pada bunuh diri di Provinsi Aceh,

# CATATAN DARI LAPANGAN

Sepanjang bulan Oktober 2019 tepatnya sejak tanggal 10 hingga 24 Oktober 2019, 7 Puskesmas dari 4 Kabupaten di Provinsi Aceh memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) ke-27. Mereka yang mengambil bagian adalah Puskesmas Kecamatan Lhoknga dan Kuta Baro, Aceh Besar; Panga dan Teunom, Aceh Jaya; Simpang Tiga, Pidie; serta Syamtalira Aron dan Dewantara, Aceh Utara. Tidak kurang dari 900 orang ikut memperingati HKJS yang jatuh pada tanggal 10 Oktober setiap tahunnya ini. Perayaan berlangsung di masing-masing kecamatan dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mandiri dan keluarga, kader Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ), pemerintah kabupaten, puskesmas, unsur Muspika, aparat desa, masyarakat umum, sekolah, universitas, maupun pihak swasta.

Peringatan ini merupakan bagian upaya promotif dan preventif penanggulangan masalah kesehatan jiwa yang tengah diupayakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Provinsi, bekerja sama dengan Forum Bangun Aceh (FBA), dan CBM Indonesia dengan Ketua Program Aceh Comprehensive Community Mental Health (ACCMH) FBA. Aktivitas dikemas dalam berbagai bentuk promosi, sosialisasi, konseling kesehatan jiwa dan bahaya NAPZA, permainan *outbond* ceria,



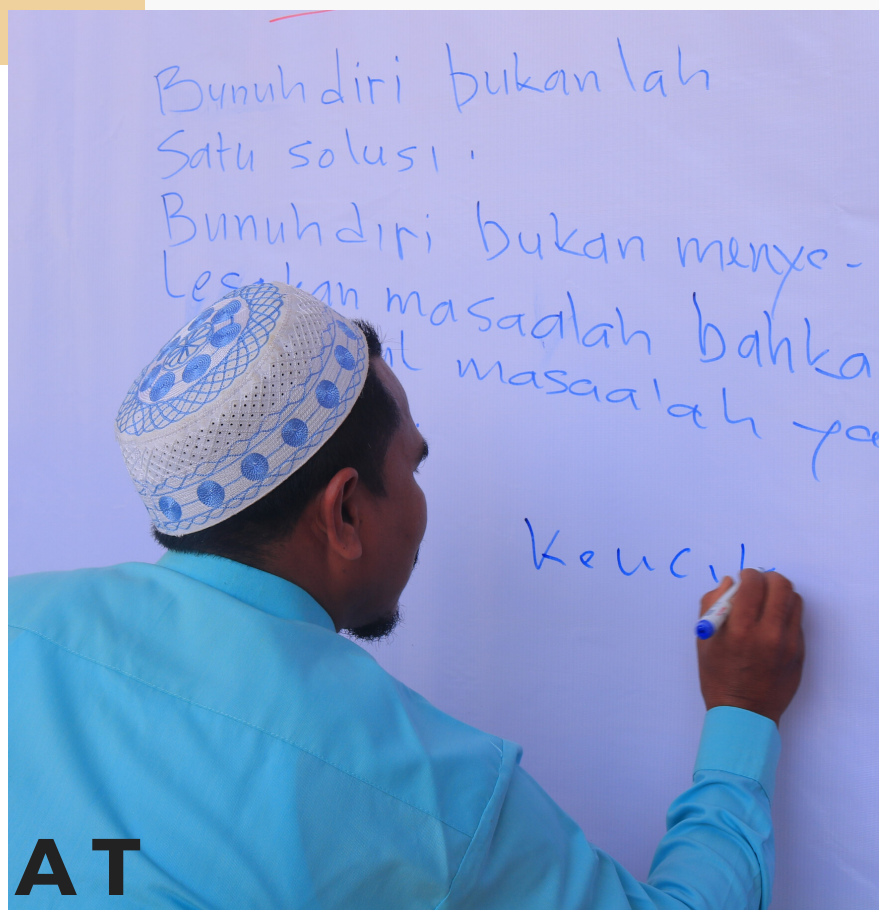
pameran dan pembagian hasil karya serta pertunjukan bakat masyarakat dengan gangguan jiwa mandiri.

Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya, Tengku Yusri S, yang hadir sebagai Kepala Badan Narkotika Kab. Aceh Jaya menyambut baik pelaksanaan HKJS di Kabupaten Aceh Jaya. Beliau menghimbau agar pemerintah dan masyarakat mendukung sepenuhnya program Keswa di Aceh Jaya guna meminimalisir kasus. Sementara Ibu Safridah, S.Kep, M.Si selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Teunom juga menyampaikan bahwa "Event ini sangat bermanfaat guna meningkatkan kepedulian sosial, merubah pola pikir masyarakat umum terhadap ODGJ, dan sebagai wujud upaya memanusiakan manusia",

Pada sesi *peer-support* dalam HKJS di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, Suryani (32), satu dari 240 ODGJ yang terdata di Kec. Kuta Baro memberanikan diri untuk berdiri di podium. "Saya berdiri disini untuk memberi *support* kepada teman-teman yang belum pulih agar teman-teman tidak berputus asa, kalian bisa pulih beraktivitas seperti saya, banyak yang mau membantu kita". Upaya ini dilakukan Suryani yang saat ini telah mampu menjadi penjahit guna memberikan dukungan dan menolak stigma bahwa ODGJ tidak bisa hidup produktif.



Tim pelaksana Program ACCMH berharap aktivitas seperti ini dapat terus dilaksanakan di Provinsi Aceh mengingat masih awamnya masalah kesehatan jiwa di bahas dikalangan masyarakat. Sehingga munculnya stigma dan perlakuan diskriminatif yang diterima oleh masyarakat yang sedang atau pernah mengalami gangguan jiwa. Selain itu, tim juga berharap, peran lintas sektor terus diperkuat dari tingkat desa hingga provinsi terkait upaya pemenuhan Hak Disabilitas merujuk pada UU No. 8 tahun 2016, sehingga terwujudnya masyarakat dengan Pembangunan Inklusi Disabilitas di Provinsi Aceh.



# SALAM SEHAT JIWA